

SKRIPSI

FRANKY BERNADUS MAURITZ LATUMANUWY

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK DI RUMAH SAKIT SWASTA

RR
Per 24/2/98
Ret
p



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA KONTRAK
DI RUMAH SAKIT SWASTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

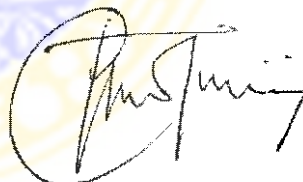
Pembimbing,



Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.

NIP. 130 873 453

Penyusun,



Franky B.M. Latumanuwy

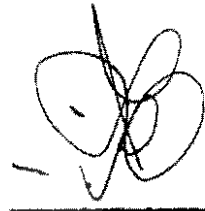
NIM. 039313827

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

Telah diuji di hadapan Panitia Penguji pada tanggal : 28 Juli 1998.

Panitia Penguji Skripsi :

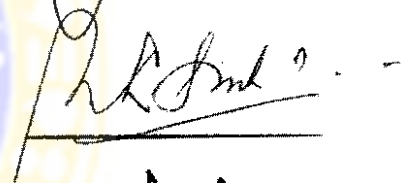
1. Ketua : R. Indiarso, S.H.



2. Sekretaris: Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.



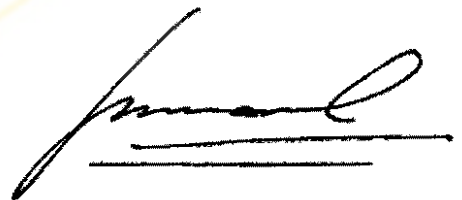
3. Anggota : 1. Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.



2. H. Samzari Boentoro, S.H.



3. Machsoen Ali, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perjanjian kerja merupakan dasar adanya suatu hubungan kerja antara pekerja, dalam hal ini pekerja kontrak, dengan pihak pengusaha. Dalam pengadaan suatu perjanjian kerja hendaknya dilandasi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan asas kemitraan di antara para pihak, dimana dibuat atas kemauan bebas kedua belah pihak; adanya kemampuan dan atau kecakapan pihak-pihak untuk membuat suatu kesepakatan; dan perjanjian kerja yang disepakati tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Bila kondisi seperti tersebut di atas dapat terpenuhi, maka kedudukan dan peranan dari pekerja kontrak dalam mengadakan hubungan kerja, khususnya di rumah sakit, akan dapat terlihat keberadaannya. Tetapi dalam kenyataannya, kondisi seperti yang diinginkan di atas

tidak dapat terpenuhi karena di dalam mengadakan hubungan kerja, seorang calon pekerja telah diperhadapkan terlebih dahulu dengan suatu format perjanjian kerja dalam bentuk *kontrak baku* yang telah menutup kemungkinan seorang calon pekerja dapat memperjuangkan keinginannya untuk dapat dituangkan sebagai isi dari perjanjian kerja. Pada dasarnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja kontrak adalah adanya kebijaksanaan dari pengusaha disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan, tanpa adanya perhatian akan kepentingan pekerja sehingga ada kecenderungan pekerja sebagai hanya sebagai alat saja; dan perjanjian kerja sebagai formalitas sehingga kurang jelas perlindungan hukumnya.

- b. Perlindungan hukum bagi pekerja, khususnya pekerja kontrak, menjadi hal yang pokok dan mutlak perlu untuk dipikirkan guna menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan yang menginginkan agar setiap warganegara dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka dibentuklah suatu perlindungan melalui ketentuan hukum dalam suatu jaminan sosial bagi tenaga kerja dan jaminan kesejahteraan, dengan segala konsekwensi yuridisnya. Hambatan tetap dialami oleh para penegak hukum dalam melakukan perlindungan hukum bagi

pelaksanaan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja, khususnya pekerja kontrak. Masih adanya kerancuan terhadap kewenangan dari setiap lembaga yang seharusnya berwenang menangani permasalahan perlindungan hukum tersebut. Hal ini ditambah dengan masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu diperhatikan juga segala hal yang berkaitan dengan pengupahan. Walau sudah sesuai dengan standar upah minimum regional (UMR), tetapi tetap belum dapat memberikan pemenuhan akan kebutuhan hidup minimum dari sebagian pekerja. Selain itu, segenap ketentuan yang ada belum dapat memberikan perlindungan dalam hal kepastian pendapatan bagi pekerja kontrak. Di sisi yang lain pihak pengusaha tidak mengikutkan pekerjajnya dalam penyelenggaraan Jamsostek karena dianggap hanya menjadi suatu beban bagi pihak pengusaha. Secara lebih khusus, bagi pihak rumah sakit telah merasa cukup dengan memberikan jaminan kesehatan secara pribadi bagi pekerja kontraknya.

2. Saran

- a. Mengingat perlu adanya perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang mengatur tentang kedudukan dan peranan pekerja kontrak

dalam mengadakan suatu hubungan kerja, maka diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hal tersebut di atas. Di lain pihak, tetap diperlukan suatu kerjasama antara pekerja dengan pengusaha, yang dengan itikad baik harus selalu berusaha untuk mewujudkan suatu bentuk hubungan kerja yang harmonis dan seimbang.

- b. Mengingat pentingnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dalam kaitannya dengan adanya jaminan sosial dan kesejahteraan, maka diperlukan suatu formulasi pemberian sanksi secara tegas, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun sanksi administratif. Selain itu perlu ditumbuhkan suatu kesadaran pada pihak pekerja agar mau termotivasi lebih bekerja keras lagi sebagai salah satu pelaku usaha, sehingga mendatangkan suatu kewajiban bagi pengusaha, dalam hal ini pihak rumah sakit, untuk lebih memikirkan kesejahteraan pekerjanya. Dengan adanya peningkatan profesionalisme dalam bekerja, akan menimbulkan produktifitas kerja yang lebih baik. Otomatis hal ini akan lebih meningkatkan hasil produksi, yakni dapat menghasilkan suatu bentuk pelayanan yang lebih baik sehingga akan tetap tercipta kesinambungan usaha bagi rumah sakit.